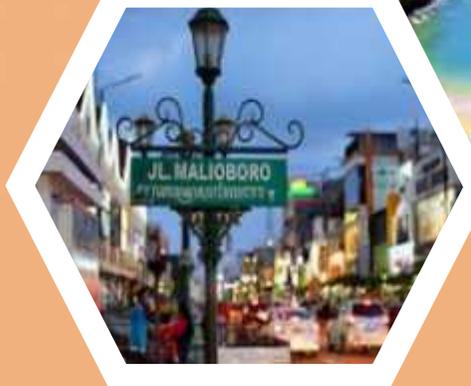


TAHUN
2018



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DIY**
Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telp.(0274)
562811 psw.1117, Faxes (0274) 564944
Website:<http://dppka.jogjaprovo.go.id>

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY Tahun 2018 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018. LKjIP Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY Tahun 2018 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Menindaklanjuti dinamika perencanaan Pemerintah Daerah DIY Tahun 2018 serta perubahan Kelembagaan Daerah DIY pasca disahkannya Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta No.1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai Januari 2019 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang melekat pada manajemen Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, sesuai Surat Perintah Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2019, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset menghantarkan pertanggungjawaban kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2018.

Yogyakarta, Februari 2018

KEPALA BPKA DIY

Drs Bambang Wisnu Handoyo

NIP 19601003 198803 1 006

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY Tahun 2018 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY Tahun 2018 yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY Tahun 2017-2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY yang dihasilkan di tahun 2018, dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Sasaran 1: Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dengan indikatornya Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2018 adalah 100%.
- b. Sasaran 2: Optimalisasi aset-aset Pemda DIY, dengan indikatornya Nilai Rupiah optimalisasi aset-aset Pemda DIY, capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2018 adalah 109,33%

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY ke depan berganti Nomenklatur menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, sebagai berikut.

1. Dalam hal peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, antara lain:
 - a. Kecermatan dan ketelitian dalam penyajian nilai pada akun-akun laporan keuangan Perangkat Daerah dengan adanya Perubahan OPD sesuai Perdis 1/2018 baik penggabungan, pemisahan dan perubahan nomenklatur.
 - b. Perubahan Permendagri terkait dengan pengelolaan barang milik daerah yaitu Nomor 108 tahun 2016 tentang Kodifikasi Barang Milik Daerah yang segera harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY pada penyusunan laporan keuangan tahun 2019.

- c. Optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah Eksisting
 - d. Pendirian dan pengisian organ kepengurusan BUMD baru
 - e. Sinkronisasi dan harmonisasi regulasi pengelolaan keuangan daerah
 - f. kurang optimalnya Perangkat daerah berpendapatan dalam pengelolaan retribusi
 - g. Mispersepsi antar instansi dalam pengelolaan pajak daerah
 - h. Optimalisasi penerapatan SHBJ, SBK dan ASB dalam sistem informasi keuangan daerah
 - i. sinergitas pengawasan internal dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah
 - j. peningkatan kualitas SDM menghadapi era modernisasi keuangan daerah
2. Dalam hal optimalisasi aset-aset Pemda DIY antara lain optimalisasi aset melalui pemanfaatan BMD dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD sehingga menghasilkan BMD yang berdaya guna.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii	
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii	
DAFTAR ISI	v	
DAFTAR TABEL	vi	
DAFTAR GAMBAR.....	vii	
BAB I	BAB I PENDAHULUAN	1
	1.1 Struktur Organisasi	2
	1.2 Fungsi dan Tugas	2
	1.3 Isu-Isu Strategis	3
	1.4 Keadaan Pegawai	4
	1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	6
	1.6 Keuangan	7
	1.7 Sistematika LKj IP	7
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
	2.1 Perencanaan Strategis	9
	2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	10
	2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	13
	2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan	13
	2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018	15
	2.3 Rencana Anggaran Tahun 2018	16
	2.3.1 Target Belanja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY	16
	2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	16
	2.4 Instrumen Pendukung.....	17
	2.5 Inovasi.....	19
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	21
	3.1. Capaian Kinerja Tahun 2018	21
	3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	22
	3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya	38
	3.4. Akuntabilitas Anggaran.....	38
BAB IV	PENUTUP.....	41
	4.1. Kesimpulan dan Rancana Tindak Lanjut.....	41
LAMPIRAN- LAMPIRAN		

Daftar Tabel

Tabel 1.4.1	Kondisi Riil Pegawai berdasarkan golongan, tingkat pendidikan dan jenis kelamin.....	4
Tabel 1.4.2	Kondisi Riil Pegawai berdasarkan Jabatan.....	5
Tabel 1.5.1	Sarana dan Prasarana DPPKA DIY	6
Tabel 2.1.1	Ringkasan Visi, Misi RPJMD DIY 2017-2022	11
Tabel 2.1.2	Sasaran Strategis DPPKA DIY	13
Tabel 2.1.3	Strategi dan Kebijakan	13
Tabel 2.2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2018	15
Tabel 2.2.2	Perjanjian Kinerja (Reviu) Tahun 2018	15
Tabel 2.3.1	Target Belanja DPPKA pada PAPBD TA.2018	16
Tabel 2.3.2	Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis	16
Tabel 3.1.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	19
Tabel 3.1.2	Capaian Kinerja Tahun 2018	20
Tabel 3.2.1.1	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	21
Tabel 3.2.1.2	Pendapatan Daerah Tahun 2018	22
Tabel 3.2.1.3	Pengesahan RAPBD dan RPAPBD.....	23
Tabel 3.2.1.4	Program dan Kegiatan dalam RAPBD dan RPAPBD	23
Tabel 3.2.1.5	Ketepatan Waktu dan Kesesuaian Laporan terhadap SAP	24
Tabel 3.2.1.6	SP2D dan SPM Tahun 2018	26
Tabel 3.2.1.7	Kinerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2018	27
Tabel 3.2.1.8	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	29
Tabel 3.2.1.9	Daftar Lokasi Layanan Kesamsatan se DIY	31
Tabel 3.2.2.1	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	34
Tabel 3.2.2.2	Nilai Proyeksi dan Realisasi Aset Tahun 2018	34
Tabel 3.2.2.3	Target dan Realisasi Kinerja sasaran optimalisasi aset-aset Pemda DIY	35
Tabel 3.4.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2018	37
Tabel 3.4.2	Analisis efisiensi	37

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Struktur Organisasi DPPKA DIY.....	2
Gambar 2.4.1	Website DPPKA DIY.....	17
Gambar 2.4.2	Tampilan awal SIPKD.....	18
Gambar 2.4.3	Tampilan awal Aplikasi Persediaan.....	18
Gambar 3.2.1	Kaleidoskop Pelayanan Samsat Desa 2018	33

BAB 1

Pendahuluan

Bab 1 Berisi :

1. *Struktur Organisasi*
2. *Fungsi dan Tugas*
3. *Isu Strategis*
4. *Keadaan Pegawai*
5. *Keadaan Sarana dan Prasarana*
6. *Keuangan*
7. *Sistematika LKj IP*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY Tahun 2018 diharapkan dapat:

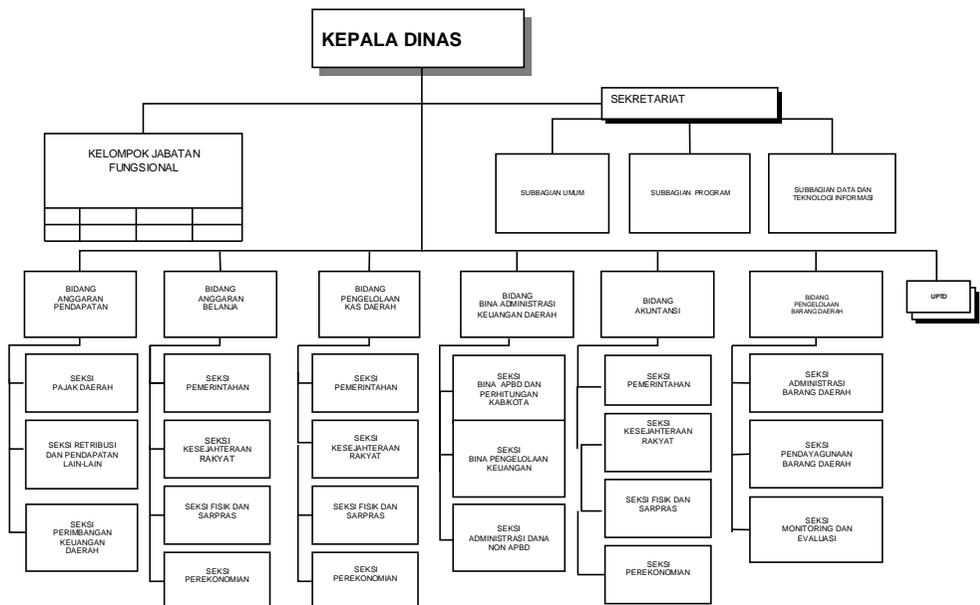
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY
2. Mendorong Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1. Struktur Organisasi DPPKA DIY



Pelaksanaan anggaran pada tahun 2018 masih menggunakan struktur Perdas 3 tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta meskipun Renstra 2017-2022 yang ditetapkan pada Mei 2018 disusun berdasarkan proyeksi struktur baru Pemerintah Daerah DIY.

1.2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2015 Tanggal 2 September 2015 bahwa Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, kas daerah, pembinaan administrasi keuangan daerah

serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan, akuntansi dan pengelolaan barang daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program di bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi dan pembinaan administrasi keuangan daerah, serta barang milik daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi dan pembinaan administrasi keuangan daerah, serta barang milik daerah;
- c. pengelolaan pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain, serta pendapatan transfer;
- d. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
- f. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Kabupaten/Kota, Badan Layanan Umum Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah serta dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- g. pengelolaan kas daerah dan akuntansi;
- h. pengelolaan barang milik daerah;
- i. pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);
- j. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja urusan keuangan serta pengelolaan barang daerah;
- k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, antara lain sebagai berikut.

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi potensi pendapatan
2. Kelembagaan BUKP
3. Pembiayaan Daerah
4. Pengembangan Kawasan JEC menjadi kawasan ekonomi baru dengan konsep *MICE Plus*.
5. Meningkatkan efektivitas pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan dan kerjasama pihak ketiga.
6. Mempertahankan status WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan memberlakukan basis akrual.

1.4 Keadaan Pegawai

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY dan UPTD di 5 KPPD se-DIY didukung oleh sumberdaya manusia sebanyak 251 orang, dengan jumlah pegawai wanita sebanyak 92 orang dan pegawai pria sebanyak 159 orang (kondisi yang ada sampai dengan 31 Desember 2018).

Tabel 1.4.1 Kondisi Riil pegawai berdasarkan golongan, tingkat pendidikan dan jenis kelamin

GOL.	LAKI-LAKI							JML	PEREMPUAN						JML	JML. TOTAL
	S2	S1	D4	D3/ D2/ SM	SLTA	SLTP	SD		S2	S1	D3/ D2/ SM	SLTA	SLTP	SD		
IV/e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/d	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
IV/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/b	3	2	0	0	0	0	0	5	4	1	0	0	0	0	5	10
IV/a	6	0	0	0	0	0	0	6	3	2	0	0	0	0	5	11
JML.GOL.IV	9	3	0	0	0	0	0	12	7	3	0	0	0	0	10	22
III/d	4	27	0	3	0	0	0	34	2	13	0	0	0	0	15	49
III/c	6	19	0	5	0	0	0	30	7	13	3	0	0	0	23	53
III/b	0	10	1	1	27	0	0	39	2	5	3	27	0	0	37	76
III/a	0	13	0	2	3	0	0	18	0	1	0	5	0	0	6	24
JML.GOL.III	10	69	1	11	30	0	0	121	11	32	6	32	0	0	81	202

II/d	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	1	0	0	0	1	4
II/c	0	0	0	0	11	3	0	14	0	0	0	0	0	0	0	14
II/b	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
II/a	0	0	0	0	2	2	3	7	0	0	0	0	0	0	0	7
JML.GOL.II	0	0	0	0	17	5	3	25	0	0	1	0	0	0	1	26
I/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/c	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
I/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
JML.GOL.I	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
JML.TOTAL	19	72	0	11	47	6	3	159	18	35	7	32	0	1	92	251

Sumber: Laporan tahunan kepegawaian DPPKA Tahun 2018, data diolah

Tabel 1.4.2. Kondisi Riil pegawai berdasarkan jabatan

No	Jabatan		Eselon	Kondisi Riil
1	Struktural	Kepala Dinas	II.A	1
		Sekretaris	III.A	1
		Kepala Bidang	III.A	6
		Kepala UPTD	III.A	5
		Kepala Seksi / Sub Bagian	IV.A	39
2	Fungsional Umum	Staf	-	199
		Jumlah		

Sumber: Laporan tahunan kepegawaian DPPKA Tahun 2018, data diolah

Jabatan struktural Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY beserta 5 UPT se DIY sebanyak 52 orang sedang jumlah ideal sesuai Peraturan Gubernur Nomor 66/2008 tentang Kualifikasi Jabatan struktural sebanyak 52 orang. Jabatan fungsional umum staf sebanyak 199 orang, sedang kebutuhan ideal sesuai formasi adalah 384 orang.

Dilihat dari beban kerja, pejabat struktural eselon II hingga eselon IV sebanyak 52 telah terpenuhi namun untuk jabatan fungsional umum masih kekurangan 185 orang, hal ini mengakibatkan terdapat jabatan fungsional umum yang dirangkap. Mengingat beban kerja sesuai dengan tugas dan fungsi instansi masih dibutuhkan tambahan pegawai. Untuk mengatasi hal tersebut dikeluarkan Surat Perintah Kepala Dinas untuk pelaksana tugas jabatan fungsional umum.

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung administrasi dan operasional pada Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY adalah sebagaimana table 1.5.1 dibawah.

Tabel 1.5.1 Sarana dan Prasarana DPPKA DIY

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	
		Kondisi Riil	Kebutuhan Ideal
1	2	3	4
1	Bangunan/gedung	73	73
2	Kendaraan roda 6	4	6
3	Kendaraan roda 4	19	28
4	Kendaraan roda 2	26	34
5	Komputer PC	372	385
6	Laptop/Note Book	112	147
7	Air Condition (AC)	242	240
8	Server	46	79
9	UPS	122	140
10	Printer/Scanner	573	565
11	CCTV	103	135
12	LCD Viewer	45	45
13	Mesin Ketik Manual	28	37
15	Brankas	16	23
16	Komputer Informasi Layanan	4	6
17	Pesawat Telepon/Faximili	105	62
18	Filling Kabinet	197	167

Sumber: Laporan inventaris BMD DPPKA 2018, data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kebutuhan ideal sarana prasarana pendukung kelancaran tugas OPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset secara umum telah memenuhi kebutuhan akan beban kerja, ada beberapa sarana lebih dari kebutuhan ideal seperti AC, printer/scanner, pesawat telepon/faximili dan filling kabinet, seiring dengan pembangunan ruang pertemuan baru, pemindahan lokasi depo arsip mapun gedung pelayanan baru.

Namun juga terdapat sarana prasarana yang kurang dari kebutuhan ideal seperti kendaraan roda 6, kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, server, UPS, CCTV, mesin tik manual, brankas dan komputer informasi layanan, tetapi tidak mengganggu operasional maupun pelayanan kepada publik, seperti kendaraan roda baik kendaraan roda 4, roda 6 maupun roda 2, mesin ketik, brankas, CCTV, komputer informasi layanan dan server. Untuk mengatasi kurangnya sarana prasarana dari kebutuhan ideal adalah dilakukan penjadwalan bus Satling dalam pelayanan kepada wajib pajak, sedang server bekerjasama dengan LTMI Dinas Kominfo DIY.

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY pada tahun 2018 berasal dari APBD DIY dan Dana Keistimewaan. Pada tahun anggaran 2018 Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp182.900.071.600,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp89.963.980.325,- dan belanja langsung sebesar Rp92.936.091.275,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja langsung yang berasal dari APBD sebesar Rp53.836.091.275,- yang didukung oleh 14 program dan 34 kegiatan. Sedangkan belanja langsung yang berasal dari dana keistimewaan sebesar Rp39.100.000.000,00 untuk 1 program dan 1 kegiatan.

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;

2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKJIP/manfaat LKJIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, Potensi yang menjadi ruang lingkup Perangkat Daerah dan Sistematika penulisan LKj IP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan- dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB 2

Perencanaan & Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. *Perencanaan Strategis*
2. *Perjanjian Kinerja Tahun 2018*
3. *Rencana Anggaran Tahun 2018*
4. *Instrumen Pendukung*

2.1 Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2018, Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY Tahun 2017-2022. Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY merupakan manifestasi komitmen Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah DIY yang tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY Tahun 2018-2022 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2012-2017).

RPJMD DIY merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 tanggal 3 Agustus 2018 tentang Penetapan Renstra SKPD Tahun 2017-2022.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Misi Gubernur DIY yang dituangkan dalam RPJMD DIY berupaya untuk menyinambungkan perencanaan periode 5 tahun sebelumnya (2012-2017) dengan perencanaan periode yang setelahnya (2017-2022). Visi Misi Gubernur DIY pada perencanaan periode 2017-2022 berkesinambungan dan melanjutkan keberhasilan capaian pembangunan dengan periode sebelumnya. Gubernur DIY pada Sidang Paripurna Istimewa tanggal 2 Agustus 2017 memaparkan pidato visi misi dengan tema **“Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”**. Pemaparan ini sebagai bagian dari rangkaian proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY untuk periode 2017-2022 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur DIY Tahun 2012-2017. Tema visi dalam pemaparan visi misi Gubernur DIY tersebut dilandasi pada aspek kesejahteraan, fenomena-fenomena Kemaritiman terkini (*Indian Ocean Rim Association (IORA)*, *Kra-Canal/ Thai Canal Project*) serta Kemiskinan di Kawasan Jogja Selatan. Dalam rangka mewujudkan tema visi tersebut, Gubernur DIY menyampaikan misi “Lima Kemuliaan” atau “Panca Mulia”, yakni:

1. terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing,
2. terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,
3. terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan,
4. terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan
5. terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi

kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Secara teknokratik, Pidato Visi Misi tersebut kemudian dituangkan dalam RPJMD DIY 2017-2022 dengan Visi :

“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”

serta dilaksanakan dengan 2 misi antara lain:

1. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban (misi tersebut merangkum Panca Mulia ke-1, 2 dan 3)
2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis (misi tersebut merangkum Panca Mulia ke-4 dan 5)

Visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD DIY 2017-2022 sebagai berikut.

Tabel 2.1.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD DIY 2017-2022

Visi: “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia”					
No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta	Angka IGI (5,59) (2016) menjadi 6,2 (2022)	1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
				1.2. Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat.	Indeks Gini
					Persentase Angka Kemiskinan
				1.3. Meningkatnya Derajat Kualitas hidup sosial masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
1.4. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi				

Visi: "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia"					
No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
				1.5. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan
				1.6. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah.	Indeks Williamson
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis;	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance).	Indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai 73,07 (BB) dalam kategori baik (2016) menjadi Sangat Baik dengan nilai 76 (A) (2022)	2.1. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan 2.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan 2.3. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	Opini BPK Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP) Prosentase capaian sasaran Pelaksanaan Keistimewaan. bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan

Sumber: website <http://bappepda.jogjaprovo.go.id>

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta : Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan dengan indikator capaian Sasaran Opini BPK.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY selama 5 tahun anggaran adalah mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel.

Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.2 Sasaran Strategis DPPKA DIY

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Base line 2017	Target tahunan					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Nilai rupiah optimalisasi aset - aset Pemda DIY	rupiah	n/a	5.950.608.853	6.234.617.858	6.453.519.026	6.704.805.116	6.967.568.518	6.967.568.518

Sumber: Renstra BPKA DIY TA.2018-2022

2.1.3 Strategi dan Arah kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

Tabel 2.1.3 Strategi, Arah kebijakan

NO	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung	1. Peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi

1	2	3	4
		direalisasikan, dengan manajemen profesional dibidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasionalan alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan	<ul style="list-style-type: none"> 2. dan ekstensifikasi pendapatan daerah; 3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah; 4. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah; 5. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah; 6. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat; Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
2	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan inventarisasi barang milik daerah agar dapat mengidentifikasi aset-aset <i>idle</i>, 2. Melaksanakan Road Map Pemanfaatan Barang Milik Daerah 3. Melaksanakan kajian terhadap aset <i>idle</i> untuk memperoleh analisis kegunaan terbaik dan tertinggi <i>Highest Best Use</i>(HBU) sebelum dilaksanakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah. 4. Mengikutkan SDM yang memenuhi syarat dalam seminar/kursus/pelatihan pengelolaan barang milik daerah terutama yang terkait dengan penilaian barang milik daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas kompetensi, profesional dan produktivitas SDM pejabat pengelola barang milik daerah di lingkungan Pemda DIY. 2. Peningkatan peran optimalisasi barang milik daerah sebagai salah satu kontributor peningkatan PAD. 3. Penyusunan SOP Pengelolaan Barang Milik Daerah supaya tata kerja sesuai dengan sistem dan prosedur serta 4. Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan barang milik daerah dapat dilaksanakan.

Sumber: Renstra BPKA DIY TA.2018-2022

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen

tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	Persen	100	I II III IV	17.18 49,87 72.30 100,00
2	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Nilai rupiah optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Rupiah	5.950.608.853,86	I II III IV	74.802.800,00 3.346.210.350,00 5675.657.903,86 5.950.608.853,86

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Pada tahun 2018, Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Reviu dilakukan karena adanya sinkronisasi dokumen perencanaan. Perjanjian Kinerja (Reviu) Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2.2 Perjanjian Kinerja (Reviu) Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	Persen	100	I II III IV	17.18 49,87 72.30 100,00
2	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Nilai rupiah optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Rupiah	5.950.608.853,86	I II III IV	74.802.800,00 3.346.210.350,00 5.675.657.903,86 5.950.608.853,86

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2018

Pada Tahun Anggaran 2018 Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp141.405.592.168,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 89.447.538.518,- dan Belanja Langsung Rp51.958.053.650,-. Melalui mekanisme perubahan APBD TA.2018 menjadi Rp143.800.071.600,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp89.963.980.325,- dan Belanja Langsung Rp53.836.091.275,-.

2.3.1 Target Belanja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY

Tabel 2.3.1 Target Belanja DPPKA DIY pada APBD Perubahan TA. 2018

Uraian	Target	Prosentase
Belanja Tidak Langsung	Rp 89.963.980.325,00	49,19 %
Belanja Langsung	Rp 53.836.091.275,00	50,81%
Jumlah	Rp143.800.071.600,00	100,00%

Sumber: Dokumen PAPBD DIY TA.2018, data diolah

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2018 Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.2 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Rp20.186.680.025,00	80,99%	10 program 21 kegiatan
2	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Rp4.739.360.725,00	19,01%	1 Program 1 kegiatan

Sumber: Dokumen Resntra BPKA DIY TA.2018

2.4 Instrumen Pendukung

Instrumen pendukung pengelolaan data kinerja dan pengukuran kinerja pada Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, sebagai berikut.

2.4.1 Website Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY

Website DPPKA DIY berfungsi untuk menginformasikan segala kegiatan dan produk-produk yang dihasilkan oleh DPPKA DIY beserta 5 KPPD se DIY, yang dapat diakses melalui <http://dppka.jogjaprov.go.id> atau <http://bpka.jogjaprov.go.id>

Gambar 2.4.1 Website DPPKA DIY



Sumber: Website DPPKA DIY, 2018

2.4.2 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem ini merupakan alat bantu dalam penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban APBD secara integratif dan *online*, digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan dan aset. Sistem ini dipertahankan karena operasionalnya simpel, baik untuk menyusun laporan keuangan berbasis akrual tahun 2018 maupun menyusun APBD TA.2019.

Gambar 2.4.2 Tampilan awal SIPKD



Sumber: Aplikasi SIPKD pada DPPKA DIY, 2018

2.4.3 Sistem Informasi Aplikasi Persediaan

Aplikasi Persediaan dibutuhkan dalam rangka membantu pencatatan persediaan untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada akun Persediaan dan Beban Persediaan. Namun yang utama dari Aplikasi Persediaan adalah sebagai kontrol penggunaan barang persediaan di masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan Aplikasi Persediaan dapat diketahui jumlah dan nominal barang persediaan secara *real-time* sesuai dengan kebijakan akuntansi tentang Persediaan.

Aplikasi Persediaan berbasis Web adalah agar Aplikasi Persediaan menjadi lebih memadai sehingga menghasilkan Laporan Persediaan yang akurat dan akuntabel. Aplikasi Persediaan Berbasis Web dapat diakses melalui persediaan.jogjaprov.go.id

Gambar 2.4.3 Tampilan awal Aplikasi Persediaan



2.5 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah DIY untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY diwajibkan untuk melakukan inovasi. Komitmen inovasi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur DIY No. 065/2017 Tahun 2015 tentang Inovasi Pelayanan Publik yang mendorong "*one agency, one innovation*". Inovasi yang diemban oleh Perangkat Daerah ditujukan juga untuk mencapai keberhasilan capaian sasaran kinerja yang telah

ditetapkan Pada tahun 2018 ini, Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY telah menginisiasi inovasi, sebagai berikut:

1. Inovasi *e-Posti*.

Posti merupakan singkatan bahasa Jawa dari *perkakas paos titian* atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai alat pajak kendaraan. Alat yang digunakan dalam pembayaran pajak ini adalah layanan ATM BPD DIY. Pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor berbasis pada teknologi pembayaran perbankan dilakukan dengan tujuan mempercepat pelayanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor dan pembayaran Pajak kendaraan Bermotor (PKB).

2. Inovasi Layanan Samsat Desa

Samsat Desa adalah layanan SAMSAT yang diselenggarakan di tingkat desa. Pelayanan dilakukan di Balai Desa dalam rangka mendekatkan pelayanan pembayaran PKB Tahunan kepada wajib pajak di wilayah pedesaan.

3. Inovasi Pembayaran 5 Tahunan *Online* se DIY

Perpanjangan STNK Kendaraan Bermotor 5 tahunan saat ini sudah *online* di wilayah DIY. Wajib pajak tidak perlu datang ke SAMSAT asal kendaraan, bisa dilakukan di SAMSAT manapun di wilayah DIY.

Inovasi *e-Posti* dan Layanan Samsat Desa telah memperoleh penghargaan sebagai Top 99 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2018 dari Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) RI, sedang Inovasi Pembayaran 5 tahunan *online* baru dirilis pada bulan Agustus 2018.

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2018*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
3. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya*
4. *Realisasi Anggaran*
5. *Inovasi*

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2018

Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY tahun 2018 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset DIY dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Perangkat

Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.1.2 Capaian Kinerja Tahun 2018

N O.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA / KODE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	Persen	100,00	100,00	100,00	Hijau Tua
	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Nilai rupiah optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Rupiah	5.950.608.853,86	6.505.543.500,00	109,33	Hijau Tua

Sumber : Monev Bappeda DIY, Tahun 2018, data diolah

Dari tabel di atas, terdapat 2 indikator yang terbagi ke dalam 2 sasaran strategis. Pada tahun 2018, sebanyak 2 indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100% dari total indikator. Capaian indikator nilai rupiah optimalisasi aset-aset Pemda DIY dengan persentase 109,33%, dan indikator transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan persentase capaian 100%.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset DIY yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Sasaran Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah

Tolok ukur capaian sasaran Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah diukur dengan 1 indikator. Indikator tersebut yaitu indikator: Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2.1.1 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah

NO	SASARAN	INDIKATOR	META INDIKATOR
1	2	3	4
1.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	Meningkatnya PAD (20%) APBD yang tepat waktu dan akurat (20%) Laporan keuangan yang akuntabel (20%) Penatausahaan keuangan daerah yang akurat (20%) Pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten (20%)

Sumber: Renstra BPKA DIY TA.2018-2022

Indikator transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan meta indikator meningkatnya PAD, APBD yang tepat waktu dan akurat, laporan keuangan yang akuntabel, penatausahaan keuangan daerah yang akurat dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten, penghitungannya dilakukan secara kualitatif akumulatif artinya apabila masing-masing meta indikator telah tercapai bobotnya adalah 20%, sehingga rumusnya adalah sebagai berikut:

$$TA = \sum PAD + \sum APBD + \sum LK + \sum KAD + \sum PKD$$

Keterangan

TA = Transparansi dan akuntabilitas

$\sum PAD$ = meta indikator meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

$\sum APBD$ = meta indikator APBD tepat waktu dan akurat

$\sum LK$ = meta indikator laporan keuangan akuntabel

$\sum KAD$ = meta indikator penatausahaan yang akurat

$\sum PKD$ = meta indikator pengelolaan keuangan daerah konsisten

Adapun penghitungan masing-masing meta indikator adalah sebagai berikut.

Meta indikator meningkatnya Pendapatan Asli Daerah adalah jumlah PAD dibagi jumlah pendapatan yang belum ditentukan peruntukan belanjanya (*non-earmark*) dikalikan seratus persen, dirumuskan sebagai berikut.

$$\Sigma \text{PAD} = \frac{\text{PAD}}{\text{PD} - (\text{CHT} + \text{DAK} + \text{DAIS})} \times 100\%$$

Keterangan.

PAD = Pendapatan Asli Daerah

PD = Pendapatan Daerah

CHT = Cukai hasil Tembakau

DAK = Dana Alokasi Khusus

DAIS = Dana Keistimewaan/Otonomi Khusus

Adapun data Pendapatan Daerah tahun 2018 adalah sebagaimana tabel di bawah.

Table 3.2.1.2 Pendapatan Daerah Tahun 2018

No.	Uraian	Realisasi Pendapatan
1	Pendapatan Daerah	5.048.111.436.627,63
2	Pendapatan Asli Daerah	540.021.281.639,83
3	Cukai Hasil Tembakau	4.903.053.900,00
4	Dana Alokasi Khusus	845.752.494.000,00
5	Danais / Otsus	1.000.000.000.000,00

Sumber : Laporan Keuangan Akhir Tahun Pemda DIY TA.2018 Un Audited, data diolah

Data di atas dimasukkan dalam rumusan, diperoleh hitungan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \Sigma \text{PAD} &= \frac{540.021.281.639,83}{5.048.111.636.627,63 - (4.903.053.900,00 + 845.752.494.000,00 + 1.000.000.000.000,00)} \times 100\% \\ &= 57,08\% \end{aligned}$$

Indikator kinerja persentase kontribusi pendapatan pajak, retribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lain yang sah terhadap pendapatan target 51,38%, sedang realisasinya tahun 2018 sebesar 57,08% sehingga persentase capaian realisasinya 111,09%. Dengan demikian capaian meta indikator meningkatnya PAD bobot 20% tercapai.

Penghitungan meta indikator APBD yang tepat dan akurat adalah sebagai berikut:

$$\sum \text{APBD} = \frac{\text{AP} + (85\%(\text{P2}/\text{P1}) \times 100\%) + (15\% \text{K2}/\text{K1}) \times 100\%)}{2}$$

Keterangan:

AP : APBD dan PAPBD tepat waktu = 100%

P1 : program sesuai KUA PPAS

P2 : program sesuai RAPBD

K1 : kegiatan sesuai KUA PPAS

K2 : kegiatan sesuai RAPBD

Data mengenai waktu Pengesahan APBD TA.2019 Perubahan APBD TA.2018, program dan kegiatan dalam KUA PPAS dan RAPBD Tahun 2019 sebagai berikut.

Tabel 3.2.1.3 Pengesahan RAPBD dan RPAPBD

No	Uraian	Tanggal		Keterangan
		Pengantaran	Pengesahan	
1	RAPBD TA.2019	17 November 2018	3 Desember 2018	Tepat waktu = 100%
2	RPAPBD TA.2018	3 September 2018	15 Oktober 2018	

Sumber: Website Biro Hukum Setda DIY, 2018, diolah

Tabel 3.2.1.4 Program dan kegiatan KUA PPAS dan RAPBD DIY

No	Uraian	Jumlah	
		KUA PPAS	RAPBD
	Program	183	183
	Kegiatan	820	944

Sumber: KUA PPAS dan RAPBD DIY.TA 2018, diolah

Dari data di atas dimasukkan dalam rumusan, diperoleh hitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \sum \text{APBD} &= \frac{100\% + (85\% (183/183) + 15\%(944/820) \times 100\%)}{2} \\ &= \frac{100\% + (85\% + 17,26\%)}{2} \\ &= 101,13\% = 20\% \end{aligned}$$

Sesuai dengan hasil perhitungan di atas, meta indikator APBD yang tepat waktu dan akurat dengan bobot 20% tercapai.

Penghitungan meta indikator laporan keuangan yang akuntabel dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$\sum \text{LK} = \text{L1} + \text{K2}$$

Keterangan.

$\sum \text{LK}$ = Laporan Keuangan Akuntabel

L1 = Sesuai = 60%

K2 = Tepat waktu = 40%

Adapun data mengenai penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 3.2.1.5 Ketepatan waktu dan Kesesuaian laporan terhadap SAP

No	Uraian	Penyajian		Ketepatan	
		Sesuai	Tidak sesuai	Tepat waktu	Tidak tepat waktu
1	Standar Akuntansi Pemerintahan (L1)				
	LRA	v	-	-	-
	Neraca	v	-	-	-
	LO	v	-	-	-
	LPE	v	-	-	-
	Perubahan SAL	v	-	-	-
	Laporan Arus Kas (LAK)	v	-	-	-
	Skor L1	60%	-	-	-

2	Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD (K2)	-	-		-
	Laporan keuangan Pemda DIY	-	-	Maret 2018	-
	Raperda Pertanggungjawaban APBD	-	-	Juni 2018	-
	Skor K2	-	-	40%	-

Sumber: LHP BPK RI Tahun 2018, data diolah

Penghitungan sesuai data tabel di atas, hasilnya adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 \sum LK &= L1 + K2 \\
 &= 60\% + 40\% \\
 &= 100\% = 20\%
 \end{aligned}$$

Dari hasil hitungan di atas meta indikator laporan keuangan yang akuntabel tercapai, bobot 20% terpenuhi.

Penghitungan meta indikator penatausahaan keuangan yang akurat, dirumuskan sebagai berikut.

$$\sum PAD = \frac{\sum SP2D}{\sum SPM} \times 100\%$$

Keterangan .

$\sum PAD$ = Penatausahaan keuangan yang akurat

$\sum SP2D$ = Jumlah SP2D yang diterbitkan

$\sum SPM$ = Jumlah SPM yang diterima

Adapun data mengenai Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan dan Surat Perintah Membayar yang diterima selama tahun 2018 adalah sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 3.2.1.6 SP2D dan SPM Tahun 2018

No.	Uraian	Jumlah
1.	SP2D terbit	11.207 dokumen
2.	SPM diterima	11.207 dokumen

Sumber: Bidang Pengelolaan Kas Daerah 2018, data diolah

Dari data dalam tabel di atas maka sesuai rumus perhitungan, diperoleh hasil sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\Sigma\text{PAD} &= \frac{11.207}{11.207} \times 100\% \\ &= 100\% = 20\%\end{aligned}$$

Hasil penghitungan adalah 100%, artinya bobot meta indikator penatausahaan keuangan yang akurat 20% terpenuhi.

Penghitungan meta indikator persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten, dirumuskan sebagai berikut.

$$\Sigma\text{KAD} = \Sigma\text{EA} + \Sigma\text{RG} + \Sigma\text{PK}$$

Keterangan

ΣKAD = Kinerja pembinaan PKD

ΣEA = Evaluasi APBD Kab/Kota

ΣRG = Regulasi pengelolaan keuangan

ΣPK = Penguatan kelembagaan, penurunan NPL, penyaluran dana pemerintah.

Data kinerja evaluasi APBD kab/kota, regulasi pengelolaan keuangan dan penguatan kelembagaan, penurunan NPL dan penyaluran dana pemerintah sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 3.2.1.7 Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah 2018

No	Uraian	Jumlah						Keterangan
		Evaluasi	Hasil	Rutin	Insidental	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Evaluasi APBD Kab / Kota							
1.1	APBD Kabupaten / Kota 2019	5	5					Bobot 50%
1.2	APBDP Kabupaten / Kota 2018	5	5					Bobot 30%
1.3	Pertanggungjawaban APBD Kabupaten / Kota 2017	5	5					Bobot 20%
2.	Penyusunan Regulasi Pengelolaan keuangan							
2.1	Regulasi rutin			1				Bobot 80%
2.2	Regulasi Insidental				5			Bobot 20%
3.	Penguatan Kelembagaan, Penurunan NPL dan penyaluran dana pemerintah							
3.1	NPL					25%	15,36%	Bobot 50%
3.1	Deviden					3.440.000.000,00	4.591.840.189,16	Bobot 50%

Sumber: Laporan realisasi kegiatan Tahun 2018 Bidang BAKD, data diolah

Dari data dalam tabel di atas, diperoleh hitungan meta indikator persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah untuk komponen kinerja evaluasi APBD Kabupaten/Kota telah memenuhi target kinerja sebanyak 15 (lima belas) Surat Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota. Akumulasi bobot komponen kinerja evaluasi APBD Kabupaten / Kota (ΣEA) adalah 100% (= 33,33%)

Hitungan meta indikator persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah komponen penyusunan regulasi pengelolaan keuangan, telah tersusun 1 paket regulasi rutin berupa Keputusan Gubernur tentang Petugas

Pengelola Keuangan pada SKPD (bobot 80%), sementara regulasi insidentil telah tersusun 5 peraturan berupa Pergub tentang Sisdur PKD, Pengelolaan Dana Keistimewaan, Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial, Subsidi Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dan Keputusan Gubernur tentang Penetapan UPT Dinas/Badan pada Pemda DIY sebagai BLUD (bobot 20%). Akumulasi bobot komponen kinerja penyusunan regulasi pengelolaan keuangan (ΣRG) adalah 100% (=33,33%)

Hitungan meta indikator persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah komponen penguatan kelembagaan, penurunan Non Performance Loan (NPL) dan penyaluran dana pemerintah, untuk target penurunan NPL di tahun 2018 tercapai yaitu 25% di tahun 2017 ditargetkan menurun 20% di tahun 2018, realisasi di tahun 2018 NPL menurun menjadi sebesar 15,36%, dengan bobot 50%.

Sedang peningkatan deviden dari target sebesar Rp3.440.000.000,00 di tahun 2017 menjadi Rp3.662.000.000,00 di tahun 2018, realisasi deviden tahun 2018 naik menjadi Rp4.591.840.189,16 (deviden) atau Rp5.011.963.022,34 (deviden+dana pembinaan+jasa produksi) bobot 50%. Akumulasi bobot kinerja komponen penguatan kelembagaan, penurunan NPL dan penyaluran dana pemerintah (ΣPK) adalah 100% (=33,33%)

Dari data penghitungan dan penjelasan di atas, persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten, diperoleh hitungan sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\Sigma KAD &= \Sigma EA + \Sigma RG + \Sigma PK \\ &= 33,33\% + 33,33\% + 33,33\% \\ &= 100\% = 20\%\end{aligned}$$

Keterangan.

ΣKAD = Pengelolaan Keuangan Daerah yang konsisten

ΣEA = Evaluasi APBD Kabupaten / Kota

ΣRG = Penyusunan Regulasi Pengelolaan Keuangan

ΣPK = Penguatan kelembagaan, penurunan NPL dan penyaluran dana pemerintah

Sesuai dengan perhitungan di atas diperoleh hasil 100%, artinya 20% bobot meta indikator persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah tercapai.

Dari hasil penghitungan masing-masing meta indikator pada indikator sasaran Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, capaian indikator kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{TA} &= \Sigma\text{PAD} + \Sigma\text{APBD} + \Sigma\text{LK} + \Sigma\text{KAD} + \Sigma\text{PKD} \\ &= 20\% + 20\% + 20\% + 20\% + 20\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Keterangan.

TA = Transparansi dan akuntabilitas

ΣPAD = Meningkatnya PAD

ΣAPBD = Penyusunan RAPBD dan RPAPBD tepat waktu dan akurat

ΣLK = Penyusunan laporan keuangan yang akuntabel

Hasil hitungan di atas dimasukkan kedalam tabel target dan realisasi kinerja sasaran transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sebagai berikut.

Tabel 3.2.1.8 Target dan Realisasi Kinerja sasaran transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

No	Indikator Sasaran	Base line 2017	2018			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2018 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	100	100	100	100	100	100

Capaian kinerja indikator sasaran transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di tahun 2018 adalah 100% dari target 100%, jadi persentase realisasi 100% .

Apabila dibandingkan dengan base line tahun 2017, realisasi tahun 2018 sebesar 100% capaian kerjanya sesuai dengan realisasi tahun sebelumnya. Sedang realisasi capaian tahun 2018 sebesar 100% terhadap target akhir Renstra sebesar 100%, artinya capaian target akhir Renstra sebesar 100% tercapai.

Faktor pendorong ketercapaian kinerja sasaran transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemda Kabupaten / kota, peningkatan sistem pelayanan yang lebih aplikatif, penyesuaian regulasi baru, responsif Pemerintah Daerah atas temuan aparat pengawasan, selain motivasi oleh pimpinan.

Pada tahun 2018 upaya yang dilakukan untuk mempertahankan agar target pendapatan asli daerah tercapai dan mengalami peningkatan adalah mempertahankan dan meningkatkan apa yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya berupa memperluas jangkauan dan jaringan pelayanan, penambahan fasilitas *e posti* dan pengembangan pelayanan Samsat Desa dan Samsat *online* untuk 5 tahunan.

Pelayanan kesamsatan dilaksanakan di masing masing KPPD di seluruh DIY atau SAMSAT Induk, di samping terdapat SAMSAT Pembantu.

Perluasan Layanan kesamsatan dilaksanakan dengan adanya SAMSAT Desa dan *Payment Point* di Kantor Cabang Pembantu BPD DIY atau Kantor Kas BPD di samping dilaksanakan melalui SAMSAT Corner di Galeria Mall dan Layanan Bus SAMSAT Keliling .

Selain itu peningkatan kualitas pelayanan dilaksanakan melalui Layanan Online 5 Tahunan DIY di Seluruh SAMSAT Induk di masing masing KPPD, Layanan Pajak Tahunan di seluruh tempat layanan kesamsatan se DIY, Loker Khusus di SAMSAT Kota Yogyakarta, Layanan *Drive Thru* di SAMSAT Kabupaten Bantul dan SAMSAT Pembantu Sewon, SAMSAT Kabupaten Sleman dan SAMSAT Kabupaten Kulonprogo.

Tabel 3.2.1.9 Daftar Lokasi Layanan Kesamsatan se DIY

No	Lokasi
1	KPPD Kota Yogyakarta
1.1	SAMSAT Kota Yogyakarta
1.2	Loket Khusus
1.3	<i>Payment Point</i> (Kantor Kas BPD DIY Giwangan)
1.4	SAMSAT Desa Kalurahan Wirogunan Mergangsan Yka
1.5	<i>E Posty</i> (Kantor BPKA DIY, KPPD/SAMSAT Kota, BPD Cabang UTama, BPD Senopati)
1.6	SAMSAT Bus Keliling
1.7	SAMSAT <i>Corner</i> (GALERIA Mall)
2	KPPD Bantul
2.1	SAMSAT Kabupaten Bantul
2.2	SAMSAT Pembantu Sewon
2.3	<i>Dhrive Thru</i> (SAMSAT Sewon dan SAMSAT Bantul)
2.4	SAMSAT DESA (Desa Sidomulyo dan Desa Argomulyo)
2.5	<i>Payment Point</i> (BPD Piyungan dan BPD Srandakan)
2.6	<i>E Posty</i> (SAMSAT Pembantu Sewon, BPD Bantul, Komplek Pemda Bantul, BPD Cabang Pembantu Banguntapan, BPD Cabang Pembantu Sedayu)
2.7	SAMSAT Bus Keliling
3	KPPD Kulonprogo
3.1	SAMSAT Kabupaten Kulonprogo
3.2	<i>Dhrive Thru</i> SAMSAT Kulonprogo
3.3	SAMSAT Desa (Desa Palihan Kecamatan Temon dan Desa Banjararum Kecamatan Samigaluh)
3.4	<i>Payment Point</i> (BPD Nanggulan)
3.5	SAMSAT Mall Pelayanan Publik
3.6	<i>E Posty</i> (KPPD/SAMSAT Kulonprogo, BPD Cabang Wates, BPD Pembantu Sentolo, BPD Cabang Pembantu Galur, BPD Cabang Pembantu Temon)
3.7	SAMSAT Bus Keliling
4	KPPD Gunungkidul
4.1	SAMSAT Kabupaten Gunung Kidul
4.2	SAMSAT Desa (Desa Semugih Kecamatan Rongkop, Desa Hargomulyo Kecamatan Gedangsari, Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari)

4.3	<i>Payment Point</i> (BPD Karangmojo, BPD Paliyan, BPD Semin, BPD Panggang)
4.4	<i>E Posty</i> (KPPD/SAMSAT Gunungkidul, BPD Cabang Wonosari, Komplek Pemda Gunung Kidul, BPD Cabang Pembantu Patuk, BPD Cabang Pembantu Playen)
4.5	SAMSAT Bus Keliling
5	KPPD Sleman
5.1	SAMSAT Kabupaten Sleman
5.2	SAMSAT Pembantu Maguwoharjo
5.3	SAMSAT Desa (Desa Pakembinangung, Kecamatan Pakem, Desa Banyurejo Tempel)
5.4	<i>Dhrive Thru</i> (SAMSAT Sleman)
5.4	<i>Payment Point</i> (BPD Godean, BPD Kalasan)
5.5	<i>E Posty</i> (BPD Cabang Sleman, BPD Kas Godean, BPD Kas Berbah, BPD Kas Condongcatur, BPD Kas Turi)
5.6	SAMSAT Bus Keliling

Sumber : Bidang Pendapatan DPPKA DIY Tahun 2018, data diolah

Dari sisi penyusunan APBD baik APBD murni maupun Perubahan APBD agar tepat waktu dan akurat upaya yang dilakukan antara lain pembahasan dengan lembaga legislatif berdasarkan tata kala penyusunan APBD. Selain itu hasil evaluasi APBD oleh Pemerintah segera ditindaklanjuti dan dibahas bersama antara eksekutif dengan legislatif. Upaya yang dilakukan dalam hal penyusunan laporan keuangan adalah penyempurnaan dan pengembangan pengelolaan milik daerah melakukan dan workshop penyusunan keuangan bagi akuntansi pada Daerah.



Gambar 3.2.1. Kaleidoskop Pelayanan Samsat Desa 2018

aplikasi barang serta bimtek laporan petugas Perangkat

Adapun penatausahaan keuangan yang akurat antara lain pencairan dana selalu dilakukan dengan teliti dan cermat, komunikasi dengan pengelola pada SKPD terus dibangun, dan sistem pendukung memadai.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang konsisten antara lain dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku, responsif dalam menindaklanjuti amanat peraturan perundangan, komunikasi dan koordinasi dengan mitra kerja yaitu OPD, kabupaten/kota BUMD, BUKP serta pembinaan secara intensif.

3.2.2 Sasaran Optimalisasi aset-aset Pemda DIY

Tolok ukur capaian sasaran Optimalisasi aset-aset Pemda DIY diukur dengan 1 indikator, yaitu indikator nilai rupiah optimalisasi aset-aset pemda DIY. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2.2.1 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY

NO	SASARAN	INDIKATOR	META INDIKATOR
1	2	3	4
2.	Optimalisasi aset-aset di Pengelola Barang Milik Daerah	Nilai rupiah optimalisasi aset-di Pengelola Barang Milik Daerah	Nilai proyeksi optimalisasi aset di Pengelola Barang Milik Daerah

Sumber: Renstra BPKA DIY TA.2018-2022

Indikator nilai rupiah optimalisasi aset-aset Pengelola Barang Milik Daerah meta indikator nilai proyeksi optimalisasi aset di Pengelola BMD, rumusannya adalah sebagai berikut:

$$\sum OA = \sum RD + \sum TB + \sum KP$$

Keterangan.

OA = Optimalisasi aset

RD = Realisasi sewa rumah dinas

TB = Realisasi sewa tanah dan bangunan

KP = Realisasi kontribusi pemanfaatan BMD

Data proyeksi dan realisasi optimalisasi aset-aset Pemda DIY adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2.2.2 Nilai Proyeksi dan Realisasi Aset Tahun 2018

No	Uraian	Nilai	
		Proyeksi (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Retribusi Rumah Dinas	122.283.800,00	115.613.000,00
2.	Sewa Tanah dan Bangunan	4.995.325.053,86	5.556.930.000,00
3.	Kontribusi Pemanfaatan BMD	833.000.000,00	833.000.000,00
	Jumlah	5.950.608.853,00	6.505.543.500,00

Sumber : Laporan Keuangan Akhir Tahun Pemda DIY 2018 Un. Auidited, data diolah

Penghitungan meta indikator nilai proyeksi optimalisasi aset-aset Pemda DIY adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\Sigma OA &= \Sigma RD + \Sigma TB + \Sigma KP \\ &= 115.613.000,00 + 5.556.930.000,00 + 833.000.000,00 \\ &= 6.505.543.500,00\end{aligned}$$

Kinerja sasaran optimalisasi aset-aset Pemda DIY dengan indikator nilai rupiah aset-aset Pemda DIY pada tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 3.2.2.3 Target dan Realisasi Kinerja sasaran optimalisasi aset-aset Pemda DIY

No	Indikator Sasaran	Base line 2017	2018			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2018 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Optimalisasi aset - aset Pemda DIY	n/a	5.950.608.853,86	6.505.543.500,00	109,33	6.967.568.518,00	85,40%

Capaian kinerja indikator nilai rupiah aset-aset Pemda DIY di tahun 2018 adalah Rp6.505.543.500,00 dari target Rp5.950.608.853,86, jadi persentase realisasi 109,33%.

Apabila dibandingkan dengan base line tahun 2017, realisasi tahun 2018 sebesar Rp6.505.543.500,00 capaian kinerjanya tidak dapat diperbandingkan. Realisasi capaian tahun 2018 sebesar Rp6.505.543.500,00 terhadap target akhir Renstra sebesar Rp6.967.568.518,00, capaian kinerjanya sudah mencapai 85,40%.

Faktor pendorong tercapainya sasaran optimalisasi aset-aset Pemda DIY adalah konsistensi penerapan peraturan dalam pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah, disamping pengembangan sistem pengelolaan aset seperti aplikasi persediaan, SIPKD Modul Aset, serta respon yang cepat untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi aparat pengawasan.

Dalam upaya agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai tidak terlepas dari berbagai kendala diantaranya adalah adanya rumah dinas dan atau tanah bangunan yang mestinya dapat disewakan namun digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi pemerintah daerah maupun dipinjam pakaikan.

Atas kendala tersebut upaya mengoptimalkan potensi sumber-sumber pemanfaatan barang milik daerah yaitu dengan mengidentifikasi aset-aset *idle* di Pengguna/Kuasa Pengguna Barang sehingga aset-aset *idle* tersebut dapat dilakukan kajian untuk kemudian dioptimalkan sesuai kegunaannya.

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memiliki indikator kinerja lainnya (SPM dan atau MDGs).

3.4 Akuntabilitas Anggaran

Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 90,79% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 41,87%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 48,92%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan sasaran Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah (94,86%) diikuti program/kegiatan di sasaran Optimalisasi asset-aset Pemda DIY (94,38%).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2018 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut.

Tabel .3.4.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(% Realisasi)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	100	100	100,00	20.186.680.025,00	19.200.023.627	95,11
2	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Nilai rupiah aset-aset Pemda DIY	5.950.608.853,86	6.505.543.500,00	109,33	4.739.360.725	4.473.108.878	94,38
Jumlah						24.926.040.750,00	23.673.132.505	94,75
Total Belanja Langsung						53.836.091.275	49.017.939.881	91,05

Tabel 3.4.2 Analisis efisiensi

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = (5-4)
	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	100,00	95,11	4,89
	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Nilai rupiah aset-aset Pemda DIY	109,33	94,38	5,62

(Hanya untuk indikator kinerja sasaran yang capaiannya $\geq 100\%$)

Analisis Efisiensi

Dari 2 Sasaran strategis, terdapat 2 sasaran yang kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebagai berikut.

1. Sasaran Optimalisasi asset-aset Pemda DIY telah mencapai kinerja sebesar 109,33%. Efisiensi anggaran 5,62% diperoleh melalui pemanfaatan teknologi informasi dan perbaikan proses bisnis .
2. Sasaran peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah telah mencapai kinerja sebesar 100%. Efisiensi anggaran 4,89% diperoleh melalui pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan budaya kerja.

BAB 4

Penutup

Bab 5 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rencana Tindak Lanjut*

Penyelenggaraan kegiatan di Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY pada Tahun Anggaran 2018 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY Tahun 2017-2022. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis 2 sasaran, terdapat 2 indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2018, dari 2 indikator seluruhnya telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100% dari total indikator.
2. Kendala, permasalahan dan hambatan yang dihadapi untuk mencapai sasaran antara lain:
 - a. Kurangnya pengawasan dalam pengelolaan retribusi, pengelolaan pajak daerah melibatkan beberapa instansi sehingga pengambilan keputusan tidak bisa segera dilakukan selain kebijakan dari Pusat yang sering berubah yang sifatnya mendadak.
 - b. Kurang siapnya aplikasi pengelolaan barang milik daerah untuk perhitungan penyusutan barang milik daerah dalam penyusunan laporan keuangan sehingga penghitungan penyusutan harus dilakukan secara manual terlebih dahulu sebagai dasar pencocokan dengan penghitungan penyusutan dari aplikasi. Permasalahan lain adalah masih ditemukan kurangnya kompetensi beberapa petugas penyusun laporan keuangan perangkat daerah.
 - c. Aset-aset *idle* belum seluruhnya teridentifikasi terutama aset-aset yang terdapat pada pengguna dan/ atau kuasa pengguna barang.

- d. Standar operasional prosedur terkait pengelolaan barang milik daerah belum tersusun secara runtut dan komprehensif, mengakibatkan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemda DIY belum terpantau dengan baik.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan ke dalam Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan potensi sumber-sumber retribusi daerah yang lain, penyempurnaan aplikasi *e-Ret* sehingga transaksi retribusi terpantau secara transparan, koordinasi intensif dengan instansi pengelola pajak serta komunikasi intensif dengan pemerintah pusat terkait kebijakan baru.
2. Melakukan penyempurnaan dan pengembangan aplikasi pengelolaan barang milik daerah serta melakukan Bimtek dan workshop penyusunan laporan keuangan bagi petugas akuntansi perangkat daerah.
3. Melaksanakan inventarisasi BMD secara kontinyu agar dapat mengidentifikasi aset-aset *idle*, melaksanakan road map pemanfaatan BMD dan kajian terhadap aset-aset *idle* untuk memperoleh analisis kegunaan terbaik dan tertinggi (Highest Best Use-HBU) sebelum dilaksanakan pemanfaatan BMD.
4. Menyusun SOP/Pergub dari masing-masing siklus pengelolaan BMD sehingga pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD dapat efektif dilaksanakan.

LAMPIRAN:

Lampiran 1. Struktur Organisasi

Lampiran 2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

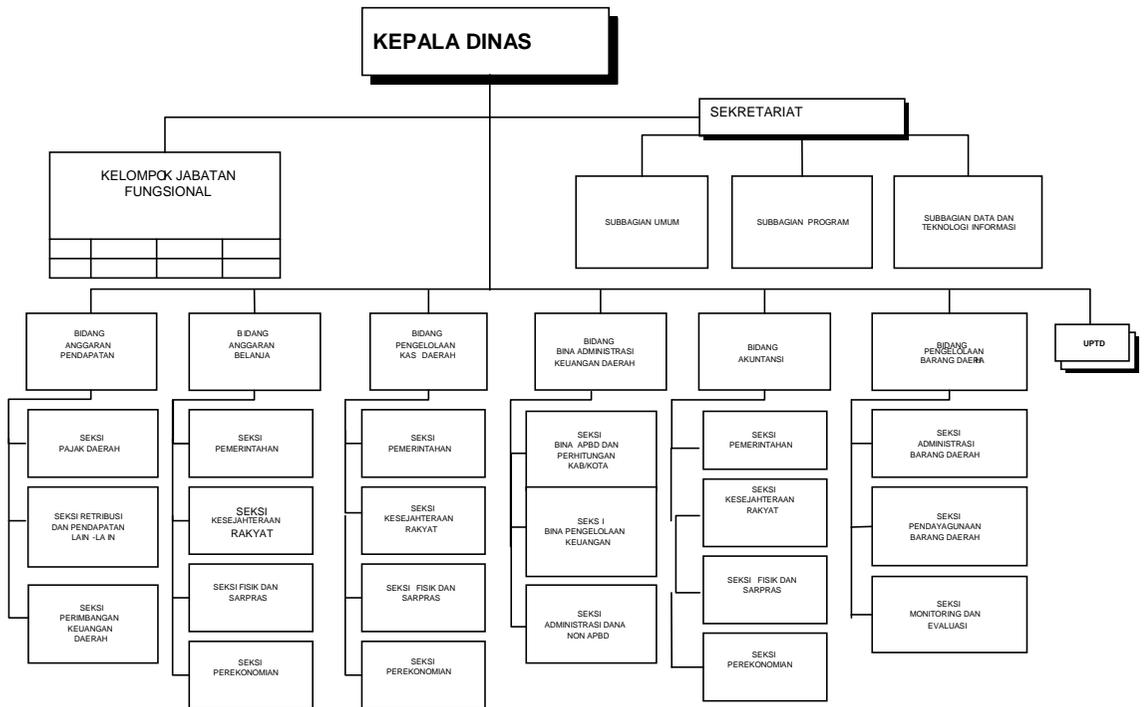
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya

Lampiran 5. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Lampiran 6. Penghargaan yang pernah diterima

Lampiran 1. Struktur Organisasi



Lampiran 2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Visi : *Terwujudnya peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja*

Misi : *1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis*

Tupoksi : *melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, kas daerah, pembinaan administrasi keuangan daerah serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan, akuntansi dan pengelolaan barang daerah*

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target					Ket
					TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel	Peningkatan Kualitas pengelola keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan.	%	100	100	100	100	100	
		Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY	Optimalisasi Aset Pengelola Barang Milik Daerah	rupiah	5.950.608.853	6.234.617.858	6.453.519.026	6.704.805.116	6.967.568.518	

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akutanbilitas pengelolaan Keuangan	persen	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	17.18 49,87 72,30 100,00
2	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Optimalisasi Aset Pengelola Barang Milik Daerah	rupiah	5.950.608.853	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	74.802.800,00 3.346.210.350.00 5.675.657.903,00 5.950.608.853,86

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Kepatihan Danurejan Telep. 562811, 561515, Fax. 588613
Yogyakarta 55213**

TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKj IP TAHUN SEBELUMNYA (2017)

Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY

No	Perihal	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
	Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem AKIP Tahun 2017 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY Nomor:700/01347, tanggal 24 - 04 - 2018	Rekomendasi: Kepala DPPKA DIY beserta seluruh jajarannya, agar pada tahun anggaran berikutnya: a. mempertahankan / meningkatkan kinerja yang telah dicapai yaitu pada Aspek Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja; b. dalam menyampaikan LKjIP dilaksanakan tepat waktu c. melakukan upaya peningkatan capaian kinerja pada aspek Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi terutama terkait dengan capaian	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY beserta seluruh jajarannya telah melakukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang dicapai pada Aspek Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja, berupaya untuk menyampaikan LKjIP tepat waktu serta mengupayakan peningkatan capaian kinerja aspek pencapaian sasaran / kinerja organisasi

No	Perihal	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
		kinerja <i>outcome</i> dan capaian kinerja dari penilaian <i>stake holder</i>	terkait capaian kinerja <i>outcome</i> dan capaian kinerja dari penilaian <i>stake holder</i> .

Kepala BPKA DIY

Drs Bambang Wisnu Handoyo
NIP.19601003 198803 1 006

Lampiran 5 : Surat Sekda DIY



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 521818
Website: biroorganisasi.jogjaprov.go.id Email: roorganisasi@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor: 061 / 1058

29 JAN 2019

- Dasar :
1. Peraturan Daerah Daerah istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah istimewa Yogyakarta yang diikuti penataan kelembagaan dan personal pada bulan Januari 2019.
 2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur DIY No. 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan kepada Perangkat Daerah untuk :
 - a. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan menyampaikan kepada Gubernur paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan.

MEMERINTAHKAN

Kepada:

1. Kepala Perangkat Daerah dan Biro yang tidak berubah nomenklatur lembaganya, untuk mengkoordinasikan penyusunan dan menandatangani Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 serta mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 pada Perangkat Daerah masing-masing;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, untuk mengkoordinasikan penyusunan dan menandatangani Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY serta mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
3. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, untuk mengkoordinasikan penyusunan dan menandatangani Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Dinas Pertanian DIY dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY serta mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY untuk mengkoordinasikan penyusunan dan menandatangani Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Dinas Kehutanan DIY dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Badan Lingkungan Hidup DIY serta mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY;
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY, untuk mengkoordinasikan penyusunan dan menandatangani Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Badan Perpustakaan dan Arsip DIY serta mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY, untuk mengkoordinasikan penyusunan dan menandatangani Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY serta mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY;



7. Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY, untuk mengkoordinasikan penyusunan dan menandatangani Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY;
8. Kepala Dinas Kesehatan DIY, untuk mengkoordinasikan penyusunan dan menandatangani Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Dinas Kesehatan DIY, RS. Jwa Grhasia dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 RS. Respira serta mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 pada Dinas Kesehatan DIY, UPT RS. Jwa Grhasia dan UPT RS. Respira;
9. Paniradya Pati Kaistimewan, untuk mengkoordinasikan penyusunan dan menandatangani Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Sekretariat Parampara Praja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Asisten Keistimewaan Setda DIY serta mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Paniradya Kaistimewaan;
10. Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY, untuk mengkoordinasikan penyusunan dan menandatangani Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan DIY serta mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY;
11. Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY, untuk mengkoordinasikan penyusunan dan menandatangani Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY serta mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY;
12. Kepala Biro Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY, untuk mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Biro Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY;
13. Kepala Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY untuk mengkoordinasikan penyusunan dan menandatangani Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Biro Umum dan Protokol Setda DIY serta mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY;
14. Kepala Badan Penghubung Daerah DIY, untuk mengkoordinasikan penyusunan dan menandatangani Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Kantor Perwakilan Daerah DIY serta mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Badan Penghubung Daerah DIY.

Demikian Surat Perintah Tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



 s.d. GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 SEKRETARIS DAERAH

 dr. GATOT SAPTADI
 NIP.19590902 198803 1 003

Lampiran 6. Penghargaan yang pernah diterima

1. Piagam Penghargaan Kementerian Keuangan RI diberikan kepada Pemerintah Provinsi DIY sebagai Terbaik kategori Pengelolaan Keuangan Daerah dan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017.



2. Piagam Penghargaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diberikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY atas Inovasi *e-Posti* dan Samsat Desa sebagai Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018.



